Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	7

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

49 Dewan Dilaporkan Kejati

(Nekat tak Kembalikan Tunjangan)

SEMARANG – Organisasi tanpa bentuk Andalan Jeli Tangguh (AJT) tidak mau kompromi terhadap praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Jawa Tengah.

AJT secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menuntaskan kasus dugaan korupsi anggaran tunjangan listrik, telepon dan air PDAM tahun anggaran 2015. Kasus korupsi senilai Rp 2.970.258.240,00 tersebut diduga melibatkan 49 anggota dan pimpinan DPRD Kota Semarang.

Desakan itu disampaikan langsung Pilar AJT Prof Jalil, Minggu (19/2). "Kasus dugaan korupsi tunjangan listrik, telepon dan PDAM itu harus segera dituntaskan. Anggota DPRD yang memberikan janji-janji muluk saat kampanye, tak sepantasnya melakukan dugaan korupsi seperti itu,"tegasnya.

Kasus dugaan korupsi anggaran listrik, telepon dan PDAM tersebut, masih menurut Prof Jalil secara resmi sudah dilaporkan ke Kejati Jateng. Yaitu sekitar tanggal 30 Januari 2017. Sehigga tidak ada alasan bagi Kejati untuk tidak menuntaskan kasus tersebut.

Menurutnya, sejak pertama kali diungkap akhir 2016 lalu, ternyata tidak ada itikad baik dari DPRD Kota Semarang. Bahkan DPRD Kota Semarang juga nekat tidak mengembalikan anggaran itu. Parahnya lagi, pada tahun 2016, anggaran yang menjadi temuan BPK tersebut dimunculkan lagi.

"Tuhan punya rencana untuk Anda, untuk saya, juga untuk kita semua. Agar kita bisa berkarya lebih baik, untuk belajar dari kesalahan massa lalu. Untuk membawa Semarang ini kearah kehidupan yang bersih, rapi, indah, bermoral, bermartabat serta manusiawi. Lihatlah keadaan ada pesan apa dari Sang Pencipta,"tegasnya.

"Ini kan sangat keterlaluan sekali. Saya sudah mendapat informasi kejaksaan mulai mengumpulkan data-data dugaan korupsi tunjangan listrik, telepon dan PDAM tersebut,"imbuhnya.

Untuk mengawal kasus ini, AJT rencananya juga akan lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya bisa dilakukan supervisi, sehingga kasusnya bisa tuntas.

Sebagaimana pernah diungkapkan anggota KP-2KKN Jateng Dwi Saputro, berdasarkan LHP BPK RI, Pemkot Semarang pada tahun Tahun Anbggaran 2015 telah menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp 1.667.210.671.895,00 dan direalisasikan Rp 1.466.492.839.519,00 atau 87,96%.

Dari jumlah tersebut, Rp 7.942.500.000,00 direalisasikan untuk pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang yang belum disediakan rumah dinas.

Pengaturan tunjangan perumaha ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30/2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 18/2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang. "Dalam Perwali tersebut ditetapkan nilai tunjangan perumahan sebesar Rp 14 juta/bulan untuk pimpinan dan Rp 13.5 juta/bulan untuk anggota DPRD,"paparnya.

Berdasarkan pemeriksaan atas penentuan besaran tunjangan perumahan diperoleh berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk Sekretaris DPRD Kota Semarang. Berdasarkan laporan akhir kajian tersebut diketahui bahwa penghitungan nilai kisaran tunjangan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

Meliputi hasil studi komparatif dengan daerah lain, indicator rasio kemandirian keuangan daerah dan indicator aktivitas yang meliputi tinjauan atas unsure-unsur yang melekat pada penyediaan sewa rumah.

"Berdasarkan indikator-indikator tersebut, komponen tunjangan perumahan ditentukan tunjangan listrikuntuk wakil ketua Rp 2.676.240,00 sampai dengan Rp 3.067.470,00. Sedangkan untuk anggota Rp 2.520.480,00 sampai dengan Rp 2.888.940,00,"paparnya.

Tunjangan telepon rumah jabatan wakil ketua dewan Rp 1.338.120,00 sampai dengan Rp 1.533.735,00. Untuk anggota Rp 1.260.240,00 sampai dengan Rp 1.444.470,00.

Tunjangan air PDAM wakil ketua Rp 1.338.120,00 sampai dengan Rp 1.533.735,00. Untuk anggota Rp 1.260.240,00 sampai dengan Rp 1.444.470,00.

Tunjangan sewa rumah jabatan dinas untuk wakil ketua Rp 7.359.660,00 sampai dengan Rp 8.435.543,00. Untuk anggota Rp 6.931.320,00 sampai dengan Rp 7.944.585,00.

Jumlah total untuk wakil ketua Rp 12.712.140,00 sampai den-

■Baca 49 DEWAN ...hal 7

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	7

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

49 Dewan Dilaporkan Kejati

(Nekat tak Kembalikan Tunjangan)

49 Dewan

dari hal 1

Kasus dugaan korupsi tunjangan listrik, telepon dan PDAM itu harus segera dituntaskan. Anggota DPRD yang memberikan janji-janji muluk saat kampanye, tak sepantasnya melakukan dugaan korupsi seperti itu

PROF JALIL
Pilar AJT

gan Rp 14.570.483,00. Sedangkan jumlah untuk anggota Rp 11.972.280,00 sampai dengan 13.722.465,00.

Dari rincian tersebut, diketahui bahwa nilai tunjangan perumahan yang diberikan telah diperhitungkan tunjangan listrik, telepon dan air.

Merujuk rincian tersebut, terdapat unsur yang seharusnya tidak termasuk. Yaitu tunjangan listrik, telepon dan tunjangan air minimal sebesar kisaran terendah seperti hasil kajian. Yaitu sebesar Rp 5.352.480,00 (Rp 2.676.240,00 + Rp 1.338.120,00 + Rp 1.338.120,00) untuk wakil ketua dan sebesar Rp 5.040.960,00 (Rp 2.520.480,00 + Rp 1.260.240,00 + Rp 1.260.240,00) untuk anggota.

"Dengan memperhitungkan realisasi pembayaran per bulan diperoleh estimasi komponen tunjangan listrik, telepon dan air sebesar Rp 2.970.258.240,00," ungkapnya.

Rinciannya pembayaran kepada wakil ketua 3 orang selama 12 bulan sebesar Rp 192.689.280,00 (Rp 5.352.480,00 x 3 x 12 bulan). Pembayaran kepada anggota DPRD sebesar Rp 2.777.568.960,00 berupa pembayaran kepada 45 anggota di bilan Januari sebesar Rp 226.843.200,00 (Rp 5.040.960,00 x 45 x 1), dan kepada 46 anggota dibuan Februari-Desember 2015 sebesar Rp 2.550.725.760,00 (Rp 5.040.960,00 x 46 x 11 bulan).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan SE Mendagri No.188.31/006/PAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah No.37/2005 tentang Perubahan atas PP No.24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota DPRD. Dimana menyatakan besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubeler, biaya listrik, air, gas dan telepon.

"Temuan BPK RI jelas merugikan keuangan daerah Rp 2.970.258.240,00. Itu harus dikembalikan semua. Karena itu adalah uang rakyat," tegas Dwi Saputro.

Dengan fakta-fakta itu, AJT mendesak kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secepatnya. "Dalam waktu dekat kita akan lapor kepada pimpinan AJT. Kalau kejaksaan tidak serius, kita akan demo dengan mengerahkan massa besar-besaran. Jangan biarkan korupsi di depan mata kita," tukasnya.

Kembali disampaikan Prof Jalil, DPRD seharusnya bisa membantu mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Bukan malah melakukan dugaan korupsi anggaran di pemerintahan.

Dalam mendukung program pemerintah, AJT sudah member contoh kongkrit. Dimana selama ini sudah melaksanakan program sosial ke masyarakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Anggaran yang dikeluarkan AJT dalam satu tahun ini sudah mencapai Rp 4,6 miliar. Selain melakukan bedah rumah dan membangunan infrastruktur, AJT juga membiayai 48 mahasiswa yang kuliah di luar negeri. 10 orang sudah ada yang menjadi doktor dan empat orang menjadi profesor," paparnya.

Anggaran yang dikeluarkan AJT murni dari kantong pribadi dan tidak minta bantuan kepada siapapun. "AJT tidak mau menerima dan meminta bantuan dari siapapun. Karena AJT tidak memiliki cara meminta-minta bantuan," tukasnya.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendukung penuh program sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh AJT. Menurutnya, AJT selama ini telah mendukung program Pemkot Semarang bergerak bersama".

"Tanpa ada dukungan dari masyarakat, maka program dari Pemkot juga tidak akan jalan. Ini AJT sudah mempelopori program bergerak bersama rakyat. Ini patut dicontoh masyarkat luas," akunya dalam acara pesta rakyat AJT tanggal 17 Februari 2017 di Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati Semarang.

Walikota dari PDIP ini mengaku terharu sekali dengan apa yang dilakukan AJT. Sebab, salah satu yang dibedah adalah rumah Satgas PDIP yang reot. "Mengelola organisasi itu tidak gambang.

Ada yang suka dan ada yang tidak. Saya doakan AJT tetap top," tukasn Hendi.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono ketika dikonfirmasi terkait dengan laporan kasus tunjangan listrik, telepon dan PDAM ke Kejati menyatakan no coment.

"Saya no coment mas. Daripada saya komentar nanti jadi polemik. Karena sudah konsultasi BPK RI sudah jelas semua. **(udi)**